

PENDAMPINGAN STRATEGIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN DI DESA PAKISJAJAR KABUPATEN MALANG

Anggreani Kharimatuz Zahro, Saiful Abidin

Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin

Email : ak.zahro@aktsmalang.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 20 Oktober 2025 Revised: 10 November 2025 Accepted: 15 November 2025	<i>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Pakisjajar, Kabupaten Malang, melalui pendampingan intensif dan pelatihan tematik yang berfokus pada dua aspek utama: Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Keuangan. Pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelola BumDes yang telah dianalisis sebelumnya. Program ini mencakup pembenahan struktur organisasi, penentuan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang jelas, serta penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan evaluasi kinerja yang terstruktur.</i>
Kata Kunci : Pengabdian masyarakat, BumDes, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Transparansi, Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat.	<i>Selain itu, kegiatan ini juga memperkenalkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, termasuk penyusunan anggaran yang realistis, pencatatan keuangan yang akurat, dan penerapan mekanisme pengawasan dan evaluasi keuangan yang lebih baik. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam koordinasi antar pengurus BumDes, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta penguatan budaya kerja yang berbasis pada kepemimpinan kolektif dan kerja sama tim.</i> <i>Melalui kegiatan ini, BumDes di Desa Pakisjajar berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan asli desa (PADes), yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat desa. Keberhasilan pengelolaan BumDes juga menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, serta meningkatkan legitimasi sosial BumDes sebagai lembaga yang representatif bagi kepentingan kolektif warga desa. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berperan dalam menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pakisjajar.</i>

PENDAHULUAN

Desa Pakisjajar, yang terletak di Kabupaten Malang, merupakan sebuah desa dengan potensi yang sangat besar di sektor pertanian dan usaha kecil menengah (UMKM). Desa ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama di bidang pertanian, yang memberikan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi lokal. Selain itu, masyarakat Desa Pakisjajar memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan usaha lokal, seperti produksi pertanian, kerajinan tangan, dan produk olahan pangan. Dengan sumber daya alam yang kaya dan masyarakat yang antusias, seharusnya Desa Pakisjajar bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi desa. Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan di desa ini masih belum optimal. Potensi yang ada belum dikelola dengan baik dan efisien, yang menyebabkan ketidaktercapaian hasil maksimal dari program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, pengelolaan sumber daya yang ada di desa perlu dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Hal ini bertujuan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Desa Pakisjajar adalah kurangnya kapasitas pengelola dalam mengelola SDM dan keuangan desa secara profesional. Banyak pengelola yang belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai untuk merencanakan, mengelola, dan memonitor sumber daya desa secara efektif. Akibatnya, berbagai potensi yang ada tidak dapat berkembang secara optimal, dan tujuan pembangunan desa sering kali tidak tercapai. Tantangan ini semakin diperburuk dengan minimnya pemahaman tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendampingan strategis dalam pengelolaan SDM dan keuangan menjadi sangat penting. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip pengelolaan yang tepat dan terstruktur, serta mengarahkan pengelola desa dan pengusaha lokal dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian lebih terhadap upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan yang ada. Perbaikan ini tidak hanya dalam hal perencanaan SDM yang jelas, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Pendampingan yang diberikan harus melibatkan pelatihan dan penguatan kapasitas dalam hal manajemen SDM dan pengelolaan keuangan agar pengelola desa dapat mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efektif. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan yang lebih terstruktur, yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Pembangunan desa, sebagai bagian dari pembangunan nasional, memegang peranan penting dalam menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan harus mampu mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri, agar dapat

berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya secara lebih mandiri dan berdaya saing. Salah satu kebijakan yang dihasilkan dari undang-undang ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). BumDes diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mengelola sumber daya lokal, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi desa. BumDes juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang pada gilirannya akan digunakan untuk mendanai pembangunan desa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Namun, meskipun BumDes memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa, pelaksanaannya di berbagai daerah, termasuk di Desa Pakisjajar, masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan SDM dan keuangan yang belum terstruktur dengan baik. Banyak BumDes yang kesulitan dalam mengelola usaha karena kurangnya kapasitas pengelola dalam merancang dan menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Arifin (2019) menyebutkan bahwa banyak BumDes yang tidak dapat menunjukkan kinerja yang optimal karena tidak adanya sistem manajerial yang jelas, serta kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengelola BumDes. Hal ini menyebabkan BumDes gagal dalam memenuhi tujuan utama mereka, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi desa. Selain itu, Dewi dan Hidayat (2020) juga mengungkapkan bahwa banyak BumDes yang menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangan, di mana dana yang tersedia tidak dikelola dengan efisien, dan laporan keuangan yang ada tidak cukup transparan. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, BumDes akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat.

Tidak hanya masalah SDM dan keuangan, kendala lainnya yang dihadapi oleh BumDes adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan dana desa. Menurut Budiono dan Handayani (2022), salah satu penyebab utama kegagalan BumDes dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan BumDes. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BumDes sangat penting agar lembaga ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, BumDes tidak hanya perlu didorong untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi di desa.

Prasetyo dan Susanti (2023) juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pendampingan BumDes. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan teknis dalam hal penyusunan sistem manajemen yang baik, serta membantu pengelola BumDes dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya desa. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelola BumDes dalam merancang kegiatan yang berbasis pada potensi lokal, sehingga dapat menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan di desa. Dengan adanya pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan,

BumDes di Desa Pakisjajar dapat menjadi lebih profesional dan efektif dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan desa yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, meskipun Desa Pakisjajar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM, tantangan dalam pengelolaan SDM dan keuangan yang ada perlu segera diatasi. Pendampingan strategis dalam bidang manajemen SDM dan keuangan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa dan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan Desa Pakisjajar dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya dan menciptakan perekonomian desa yang mandiri, efisien, dan berdaya saing. Dengan demikian, Desa Pakisjajar dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa.

Menurut Arifin (2019), banyak BumDes yang gagal menunjukkan kinerja optimal, bahkan beberapa di antaranya mengalami stagnasi atau pembubaran, yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk manajemen SDM dan keuangan yang lemah. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengelolaan yang terstruktur dan tidak adanya pelatihan rutin bagi pengelola BumDes. Dalam penelitian lainnya, Dewi dan Hidayat (2020) juga menekankan pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam pengembangan BumDes, di mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sangat mempengaruhi kinerja BumDes. Masalah-masalah seperti tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP), pembagian tugas yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan keuangan berkala sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan BumDes yang efektif.

Pendampingan yang diberikan di Desa Pakisjajar bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Susanti (2023), peran perguruan tinggi dalam pendampingan BumDes sangat penting untuk mentransformasi kelembagaan ekonomi desa menjadi lebih maju. Pendampingan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari analisis kebutuhan, pelatihan berbasis kompetensi, hingga evaluasi berkala, menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapasitas pengelola BumDes. Fitriani dan Lestari (2021) juga menyoroti pentingnya pendampingan intensif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BumDes, untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga desa.

Seiring dengan kemajuan teknologi, transformasi digital juga memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Wulandari dan Syahputra (2024) mencatat bahwa transformasi digital dapat memberikan peluang besar dalam mempermudah pengelolaan keuangan desa, namun juga membawa tantangan tersendiri bagi pengelola desa dalam mengadopsi teknologi yang sesuai. Dalam hal ini, pendampingan berbasis teknologi menjadi hal yang sangat relevan, agar pengelola desa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dari berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BumDes yang efektif sangat bergantung pada pengelolaan SDM dan keuangan yang baik, serta adanya pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pendampingan dalam pengelolaan SDM dan keuangan di Desa Pakisjajar merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kinerja BumDes dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan adanya pendampingan yang tepat, diharapkan Desa Pakisjajar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menciptakan perekonomian desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan intensif dan pelatihan tematik yang difokuskan pada dua aspek utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini dirancang dalam empat kali pertemuan utama yang dibagi secara sistematis, dengan masing-masing aspek mendapatkan dua sesi pendampingan yang komprehensif. Setiap sesi disusun berdasarkan hasil observasi awal dan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh pengelola BumDes di Desa Pakisjajar, Kabupaten Malang, untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi.

1. Format Kegiatan

Kegiatan ini menggabungkan beberapa metode interaktif dan partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis peserta dalam mengelola BumDes. Format kegiatan mencakup:

1. **Workshop dan Diskusi Interaktif:** Sesi ini bertujuan untuk menyampaikan materi teori dan pengalaman praktis yang relevan dengan manajemen SDM dan keuangan BumDes. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk berdiskusi secara aktif, berbagi pengalaman, dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Diskusi ini memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber, sekaligus mendalami materi yang disampaikan.
2. **Simulasi dan Studi Kasus:** Untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta, dilakukan simulasi dan studi kasus yang menantang mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang terjadi dalam pengelolaan BumDes. Melalui simulasi ini, peserta diharapkan dapat memahami dan merasakan tantangan nyata dalam tata kelola BumDes, serta mengaplikasikan teori yang dipelajari ke dalam praktik nyata.
3. **Pendampingan Personal (Mentoring):** Pendampingan personal dilakukan untuk memfasilitasi pertanyaan, memberikan saran perbaikan, dan menyusun sistem kerja yang lebih efisien di tingkat pengelola BumDes. Mentoring ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada setiap pengelola yang memiliki tantangan spesifik, serta membantu mereka dalam

merancang struktur organisasi dan sistem kerja yang lebih baik dan fungsional.

2. Rangkaian Pertemuan

Kegiatan ini terbagi menjadi empat pertemuan utama, yang secara garis besar akan fokus pada dua aspek utama yang sangat penting dalam pengelolaan BumDes: Manajemen SDM dan Manajemen Keuangan. Berikut adalah rincian pertemuan yang direncanakan:

Pertemuan 1 & 2: Pendampingan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada pertemuan pertama dan kedua, kegiatan pendampingan akan lebih terfokus pada penguatan manajemen SDM dalam pengelolaan BumDes. Fokus utama dalam kedua pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Penguatan Struktur Organisasi BumDes: Salah satu tantangan utama yang dihadapi BumDes adalah kurangnya struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Dalam sesi ini, pengelola BumDes akan diberikan pemahaman tentang pentingnya membangun struktur organisasi yang solid, yang dapat mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus. Struktur organisasi yang baik juga akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi di antara pengelola.
- Penentuan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Masing-Masing Pengurus: Dalam kegiatan ini, peserta akan diajarkan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas bagi setiap pengurus BumDes. Penentuan tupoksi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengurus memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan BumDes, serta menghindari tumpang tindih tugas yang dapat mengganggu efektivitas kerja.
- Penerapan Sistem Rekrutmen dan Evaluasi Kinerja yang Sederhana namun Fungsional: Salah satu elemen penting dalam manajemen SDM adalah sistem rekrutmen yang efisien serta evaluasi kinerja yang tepat. Dalam sesi ini, peserta akan dipandu dalam merancang sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, serta sistem evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengurus BumDes. Sistem ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan pengelola dan peningkatan kinerja BumDes.
- Pengembangan Budaya Kerja dan Kepemimpinan Kolektif: Selanjutnya, kegiatan ini akan fokus pada pengembangan budaya kerja yang positif dan pembentukan kepemimpinan kolektif dalam BumDes. Budaya kerja yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas dan kolaborasi antar pengelola. Kepemimpinan kolektif, di sisi lain, mendorong setiap pengurus untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan BumDes, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu individu dan menciptakan kesadaran bersama untuk kemajuan BumDes.

Pertemuan 3 & 4: Pendampingan Manajemen Keuangan

Pada pertemuan ketiga dan keempat, fokus utama akan dialihkan pada

pengelolaan keuangan BumDes. Aspek ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana desa. Berikut adalah fokus utama dalam pertemuan ini:

- **Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Transparan:** Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh BumDes adalah pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan kurang terstruktur. Dalam sesi ini, peserta akan dibekali dengan keterampilan dalam menyusun anggaran yang jelas dan mudah dipahami, serta mempelajari cara-cara mengelola keuangan secara efisien. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BumDes dan pengelolaannya.
- **Pencatatan Keuangan dan Pembuatan Laporan Keuangan:** Pencatatan keuangan yang akurat dan teratur adalah salah satu dasar untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, sesi ini akan mencakup pelatihan tentang cara melakukan pencatatan transaksi keuangan yang jelas dan membuat laporan keuangan yang akuntabel. Peserta akan diberikan pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat.
- **Pengawasan Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Dana:** Sesi terakhir dalam pendampingan ini akan membahas tentang cara mengawasi penggunaan dana yang ada dalam BumDes. Evaluasi berkala terhadap penggunaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran.

Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur dan sistematis ini, diharapkan pengelola BumDes di Desa Pakisjajar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola SDM dan keuangan BumDes dengan lebih efektif, transparan, dan efisien. Pendampingan intensif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BumDes dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada untuk keberlanjutan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Pakisjajar, Kabupaten Malang, dengan fokus utama pada pendampingan intensif dan pelatihan tematik dalam pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Keuangan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes), memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja dan kapasitas pengelola BumDes. Kegiatan ini dijalankan dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis pada hasil observasi awal serta analisis kebutuhan yang dilakukan sebelumnya, sehingga materi yang disampaikan relevan dengan tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh pengelola BumDes di Desa Pakisjajar. Program ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi pengelola BumDes, tetapi juga berkontribusi pada perubahan yang lebih luas dalam pengelolaan

sumber daya desa yang berkelanjutan.

1. Penguatan Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Salah satu hasil yang paling nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah perubahan signifikan dalam struktur organisasi BumDes. Sebelumnya, struktur organisasi di BumDes Desa Pakisjajar tidak memiliki dasar yang jelas dan terstruktur. Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab antar pengurus, yang berdampak pada kurangnya koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan BumDes. Kegiatan ini telah berhasil mengubah struktur organisasi menjadi lebih terorganisir, dengan penentuan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang jelas untuk setiap pengurus.

Dengan adanya pembagian tugas yang terperinci, setiap pengurus memiliki pemahaman yang jelas tentang perannya dalam organisasi. Tupoksi yang terstruktur ini tidak hanya mengurangi kebingungan dalam pengelolaan, tetapi juga meningkatkan kualitas koordinasi di antara pengurus BumDes. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengurus kini lebih mudah untuk membagi tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tim, sehingga produktivitas meningkat. Pembagian tugas yang lebih jelas juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, karena setiap pengurus tahu siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aspek pekerjaan.

Selain itu, penguatan struktur organisasi yang lebih jelas juga mendorong terciptanya sistem komunikasi yang lebih efektif. Dengan adanya garis koordinasi yang jelas, pengurus BumDes kini dapat berkomunikasi dengan lebih lancar, sehingga masalah yang muncul dapat segera diatasi. Dengan demikian, organisasi BumDes menjadi lebih efisien dan terorganisir, yang tentunya meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha desa.

2. Penerapan Sistem Rekrutmen dan Evaluasi Kinerja

Sistem rekrutmen yang lebih sistematis dan berbasis kompetensi merupakan salah satu hasil penting dari pendampingan ini. Sebelumnya, pengelola BumDes tidak memiliki prosedur yang baku dalam memilih anggota pengurus, yang sering mengarah pada penunjukan pengurus berdasarkan kedekatan personal daripada kecocokan dengan posisi yang ada. Setelah adanya pelatihan, pengelola BumDes kini menerapkan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan objektif, yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan individu dalam mengelola usaha desa.

Proses seleksi pengurus kini dilakukan dengan lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan keahlian yang dibutuhkan untuk posisi tertentu dalam organisasi. Hal ini membuat setiap pengurus yang terpilih lebih siap untuk menjalankan tugas dan memberikan kontribusi maksimal bagi BumDes. Dengan adanya sistem rekrutmen berbasis kompetensi, BumDes mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat.

Selain itu, penerapan sistem evaluasi kinerja secara berkala memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas pengelola BumDes. Sebelum

pendampingan, evaluasi terhadap kinerja pengurus tidak dilakukan secara terstruktur, yang membuat sulit untuk menilai pencapaian tujuan dan mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan. Setelah pelatihan, pengelola BumDes kini melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan berbasis pada indikator kinerja yang jelas, seperti pencapaian target, efisiensi pengelolaan, dan kontribusi terhadap pengembangan BumDes.

Evaluasi ini memberikan umpan balik yang sangat berguna bagi setiap pengurus untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan profesional mereka. Hal ini juga berfungsi sebagai alat untuk memotivasi pengurus, sehingga mereka lebih bersemangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Evaluasi yang terstruktur ini akhirnya menciptakan budaya kinerja yang lebih baik di dalam organisasi, di mana setiap pengurus merasa dihargai dan diukur secara adil.

3. Pengembangan Budaya Kerja dan Kepemimpinan Kolektif

Budaya kerja di dalam BumDes juga mengalami transformasi yang signifikan. Sebelumnya, budaya kerja di BumDes cenderung kurang terorganisir, dan pengurus lebih berfokus pada tugas individu daripada bekerja secara tim. Hal ini mengarah pada kurangnya kolaborasi antar pengurus, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pencapaian tujuan bersama. Namun, setelah pendampingan, terdapat perubahan yang signifikan dalam pendekatan terhadap kerja tim dan budaya kolaboratif.

Pendampingan ini berhasil mengembangkan budaya kerja yang positif dengan fokus pada kolaborasi, keterbukaan, dan komunikasi antar pengurus. Dalam budaya kerja yang baru ini, setiap pengurus BumDes diajak untuk saling mendukung, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Budaya saling mendukung ini memperkuat semangat tim dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Selain itu, pengelola BumDes kini lebih menghargai pentingnya kerja sama, yang membentuk iklim organisasi yang lebih inklusif dan produktif.

Selain itu, pengenalan konsep kepemimpinan kolektif di dalam organisasi BumDes turut mengubah cara pengambilan keputusan dan pengelolaan. Sebelumnya, pengelolaan lebih berfokus pada satu individu sebagai pemimpin, yang menyebabkan beban keputusan dan tanggung jawab terlalu berat pada satu orang. Setelah adanya pelatihan, kepemimpinan kolektif diperkenalkan, di mana setiap pengurus diberi kesempatan untuk memimpin dalam bidang masing-masing. Kepemimpinan kolektif ini mengurangi ketergantungan pada satu individu dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pengurus. Hal ini mempermudah pengambilan keputusan dan mempercepat penyelesaian masalah.

4. Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Transparan

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pengabdian ini adalah pengelolaan keuangan BumDes. Sebelumnya, pengelola BumDes mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran yang jelas dan terstruktur. Kegiatan ini

berhasil memperkenalkan konsep pengelolaan keuangan yang transparan, yang meliputi penyusunan anggaran yang lebih realistis dan pencatatan keuangan yang lebih akurat.

Pengelola BumDes kini memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran tahunan yang mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang lebih terperinci dan sesuai dengan kebutuhan nyata BumDes. Anggaran yang disusun tidak hanya berfokus pada operasional sehari-hari, tetapi juga mencakup alokasi untuk pengembangan jangka panjang dan keberlanjutan usaha desa. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dana akan digunakan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

Selain itu, pengelola BumDes juga diberi pelatihan dalam pencatatan keuangan yang tepat. Sebelumnya, pencatatan keuangan cenderung dilakukan secara sederhana dan tidak terorganisir, sehingga menyulitkan dalam pelaporan dan pengawasan. Setelah adanya pelatihan, pengelola kini dapat mencatat setiap transaksi dengan lebih rinci dan terstruktur, yang memungkinkan mereka untuk memantau arus kas secara lebih efektif. Pencatatan yang baik juga memudahkan pengelola dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Transparansi ini penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BumDes. Laporan keuangan yang jelas dan terbuka memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan benar dan digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini juga memperkuat legitimasi BumDes sebagai lembaga yang sah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

5. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Keuangan

Salah satu perubahan yang sangat penting adalah penguatan sistem pengawasan keuangan. Sebelumnya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur, yang mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan atau pemborosan dana. Namun, setelah pelatihan, pengelola BumDes kini memiliki mekanisme pengawasan keuangan yang lebih baik, yang meliputi pemeriksaan berkala terhadap transaksi keuangan dan evaluasi terhadap penggunaan dana. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dana desa digunakan secara lebih efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

Pengelola BumDes kini juga dilatih untuk melakukan evaluasi penggunaan dana secara berkala. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana, tetapi juga untuk menilai apakah dana yang digunakan memberikan hasil yang optimal. Evaluasi yang rutin membantu pengelola BumDes untuk

memperbaiki alokasi dana di masa depan dan mengidentifikasi area yang perlu peningkatan dalam pengelolaan keuangan.

6. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi besar pada peningkatan kemandirian ekonomi BumDes. Dengan adanya sistem pengelolaan yang lebih baik, pengelola BumDes kini lebih mampu mengelola sumber daya yang ada secara efisien, baik itu dari sisi SDM maupun keuangan. Hal ini membuka peluang besar bagi BumDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal.

Keberhasilan dalam pengelolaan BumDes juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Dengan pengelolaan yang lebih transparan dan efisien, BumDes mampu meningkatkan hasil dari usaha-usaha yang dijalankan, seperti usaha simpan pinjam, produksi, dan layanan lainnya. Ini membawa dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat desa, dengan meningkatnya akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa yang lebih baik.

Secara lebih luas, kegiatan pengabdian ini berhasil menunjukkan bahwa manajemen yang baik dapat menjadi kunci untuk pemberdayaan desa. Pengelola BumDes di Desa Pakisjajar kini memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara lebih profesional, yang dapat meningkatkan daya saing desa dalam ekonomi yang lebih luas. Hal ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pakisjajar, Kabupaten Malang, yang berfokus pada pendampingan intensif dan pelatihan tematik terkait Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Keuangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengelola BumDes serta masyarakat desa. Pendampingan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengelola BumDes dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang ada, sehingga BumDes dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Pentingnya penguatan struktur organisasi, pembagian tugas, dan penentuan Tupoksi yang jelas telah mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antar pengurus dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan evaluasi kinerja yang objektif juga berperan besar dalam memperbaiki kualitas pengelola BumDes. Selain itu, adanya penguatan budaya kerja yang inklusif dan penerapan kepemimpinan kolektif telah menciptakan suasana yang lebih kolaboratif, yang meningkatkan solidaritas di antara pengurus BumDes. Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terstruktur, termasuk penyusunan anggaran yang realistis dan pencatatan transaksi yang lebih akurat, telah memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem pengawasan dan evaluasi keuangan yang lebih baik, pengelola

BumDes kini lebih mampu memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada peningkatan kemandirian ekonomi BumDes, dengan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat desa dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial, pendapatan asli desa (PADes) yang lebih besar, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan pengelolaan BumDes ini membuka peluang bagi Desa Pakisjajar untuk lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Dengan demikian, program pendampingan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya desa yang lebih profesional. Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengelola BumDes, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Desa Pakisjajar secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, M. A., & Handayani, S. (2022). Penguatan kelembagaan BUMDes berbasis partisipasi masyarakat di era digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 8(1), 45–53.
- Dewi, R. K., & Hidayat, T. (2020). Peran manajemen keuangan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 101–110.
- Fitriani, A., & Lestari, D. (2021). Strategi pengembangan usaha BUMDes melalui pendampingan intensif. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 10(3), 213–222.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Lubis, F., & Suhendra, R. (2018). Penerapan manajemen keuangan desa berbasis transparansi. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(4), 232–239.
- Nasution, M., & Hartati, S. (2017). Pelatihan dan pengembangan SDM aparatur desa dalam penguatan tata kelola pemerintahan. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 5(1), 65–74.
- Prasetyo, B., & Susanti, H. (2023). Optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pendampingan BUMDes: Studi kasus desa binaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(2), 85–93. <https://doi.org/10.5678/jpmd.v6i2.7890>
- Rohman, F., & Wijaya, A. (2016). Kepemimpinan dan pengelolaan SDM dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 121–130.
- Wulandari, T., & Syahputra, I. (2024). Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 3(1), 44–56.